

Hasil Penelitian

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS APARATUR DESA

(ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE EFFECTIVENESS OF VILLAGE APPARATUS)

Irham Iskandar

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Aceh
Jl. Tgk Daud Beureuh No. 26 Banda Aceh, Indonesia
e-mail: irhamis@yahoo.com

Diterima: 11 April 2018; Direvisi: 17 Juli 2018; Disetujui: 3 Oktober 2018

ABSTRAK

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Aparatur Desa (EP) seperti Tata Kelola (TK), Manfaat Dana Desa (MDD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA). Jenis metode penelitian adalah penelitian pengembangan, yaitu penelitian yang ditujukan untuk mengembangkan temuan penelitian atau teori-teori sebelumnya, baik untuk keperluan ilmu murni maupun ilmu terapan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang meliputi efektivitas, tata kelola, manfaat dana desa, dan silpa. Data sekunder diperoleh melalui kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi dan dinas pemberdayaan masyarakat dan gampong aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Hasil estimasi regresi pertama di wilayah barat Aceh (Nagan Raya-Singkil) menunjukkan variabel TK memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap efektivitas aparatur desa; variabel MDD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas aparatur desa; dan variabel SILPA memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap efektivitas aparatur desa; 2) Hasil estimasi regresi kedua di wilayah timur Aceh (Aceh Utara-Aceh Tamiang) menunjukkan variabel TK memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap efektivitas aparatur desa; variabel MDD memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap efektivitas aparatur desa; dan variabel SILPA memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap efektivitas aparatur desa; dan, 3) Hasil estimasi regresi ketiga di wilayah tengah Aceh (Aceh Tengah) menunjukkan variabel TK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas aparatur desa; variabel MDD memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap efektivitas aparatur desa; dan variabel SILPA memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap efektivitas aparatur desa.

Kata Kunci: efektivitas, tata kelola, manfaat dana desa, silpa.

ABSTRACT

The main objective of this study was to determine the factors that influence the effectiveness of village apparatus (EP) such as Governance (TK), Village Fund Benefits (MDD), Remaining More Budget Funding Financing (SILPA). This type of research method is development research, which is research aimed at developing research findings or previous theories, both for the purposes of pure science and applied sciences. The data used in this study are primary data which includes effectiveness, governance, benefits of village funds, and silpa. Secondary data was obtained through the village ministry, the development of disadvantaged areas and transmigration and the community empowerment service and Aceh village. The results show that 1). The first regression estimation results in the western region of Aceh (Nagan Raya-Singkil) show that the TK variable has a positive and insignificant influence on the effectiveness of the village apparatus; MDD variable has a positive and significant influence on the effectiveness of the village apparatus; and the SILPA variable has a negative and insignificant influence on the effectiveness of the village apparatus; 2). The results of the second regression estimation in the eastern region of Aceh (Aceh Utara-Aceh Tamiang) indicate that the TK variable has a negative and insignificant effect on the effectiveness of the village apparatus; MDD variable has a positive and insignificant effect on the effectiveness of the village apparatus; and the SILPA variable has a positive and insignificant influence on the effectiveness of the village apparatus; 3). The third regression estimation result in the central

region of Aceh (Central Aceh) shows that the TK variable has a positive and significant influence on the effectiveness of the village apparatus; MDD variable has a negative and insignificant effect on the effectiveness of the village apparatus; and the SILPA variable has a positive and insignificant influence on the effectiveness of the village apparatus.

Key Words : *effectiveness, governance, benefits of village funds, silpa*

PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan prioritas utama kesuksesan pembangunan nasional. Salah satu upaya pembangunan desa adalah dengan ditetapkannya kebijakan Dana Desa yang bersumber dari APBN. Tujuan pembangunan desa sebagaimana dituangkan di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah meningkatkan kesejahteraan hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Kebijakan pembangunan desa dan kawasan perdesaan dalam RPJMN RI 2015-2019 diarahkan untuk mengurangi kesenjangan antara desa dan kota. Dalam pelaksanaannya, pembangunan desa diharapkan mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan. Sejalan dengan hal tersebut dalam RPJM Aceh 2018-2022 tercantum Program Prioritas Aceh Kreatif yang dilakukan melalui Penguatan Badan Usaha Milik Gampong dan Budaya *Entrepreneurship*.

Provinsi Aceh menjadi salah satu provinsi yang mendapatkan perhatian cukup besar dari pemerintah dalam pengalokasian dana desa. Hal ini terlihat dari besarnya anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang dialokasikan. Pada tahun 2015 ADD yang disalurkan pemerintah pusat untuk Provinsi Aceh adalah sebesar 1,71 triliun rupiah. Jumlah ini merupakan nomor tiga terbesar setelah Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pada tahun 2016, pemerintah pusat kembali mengalokasikan dana desa ke Provinsi Aceh sebesar 3,8 triliun rupiah. Jumlah ADD ini meningkat 100 persen dibandingkan tahun 2015 (www.kemenkeu.go.id, diakses Agustus 2016).

Besarnya dana tersebut dialokasikan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi di daerahnya. Pengelolaan dana desa seharusnya berjalan secara transparan, efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku. Untuk meningkatkan kinerja dan optimalisasi penggunaan dana desa, dinilai perlu untuk mengevaluasi tatakelola dan manfaat program dana desa yang sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya. Ada beberapa literatur yang terkait dengan hal tersebut seperti Siregar dan Fazli (2017) yang hasil penelitiannya menunjukkan tingkat efektifitas keuangan desa lebih baik dibandingkan efisiensinya di Kabupaten Deli Serdang; Munti dan Heru (2017) menjelaskan bahwa kapasitas aparatur desa, ketaatan pelaporan keuangan, dan kualitas pengawasan BPB memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Gandapura di Kabupaten Bireuen., serta Saputra (2016) menemukan efektivitas pengalokasian dana desa pada desa Lembean, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli.

Secara teori, pengertian pembangunan pedesaan menurut Zaini (2014) dan Daldjoeni (2004) adalah pembangunan berbasis pedesaan dengan mengedepankan kearifan lokal kawasan pedesaan yang mencakup struktur demografi masyarakat, karakteristik sosial budaya, karakteristik fisik/geografis, pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi desa-kota, sektor kelembagaan desa, dan karakteristik kawasan pemukiman.

Pembangunan masyarakat desa adalah kegiatan yang terencana untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi kemajuan sosial ekonomi masyarakat dengan meningkatkan partisipasi masyarakat. Pembangunan sektor sosial ekonomi masyarakat desa perlu diwujudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut, efektivitas merupakan salah satu dasar untuk ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif (Mardiasmo, 2004).

Kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak dikemukakan oleh Siagian (1978), yaitu pertama, kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai; kedua, kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah "pada jalan" yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi; ketiga, proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang

hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional; empat, perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan; lima, penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja; Keenam, tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi; ketujuh, pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.

Berdasarkan beberapa pengertian tentang efektivitas diatas, maka penelitian ini akan berfokus pada efektivitas, karena dana desa merupakan program baru yang menjadi terobosan pemerintah untuk pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan yang menghabiskan dana yang sangat besar, namun ketika program itu diluncurkan belum disertai dengan sistem pelaksanaan yang kuat, dengan urgensi itu maka perlu dilihat keefektifan pelaksanaan dana desa.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis bahwa Tata Kelola (TK), Manfaat Dana Desa (MDD), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (Silpa) berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas aparatur desa dalam mengelola dana desanya, khususnya di wilayah barat, timur dan tengah.

METODE

Populasi penelitian ini terdiri dari 5 kabupaten yang berlokasi di kabupaten Aceh Tengah, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Aceh Singkil, dan Nagan Raya, dengan sampel desa yang diambil sebanyak 30 desa. Alasan pemilihan kabupaten/kota ini sudah cukup kuat karena lebih dari 20 persen jumlah kabupaten/kota. Selain itu, karena keterbatasan waktu dan sumber daya lainnya. Penelitian ini dianalisis secara kuantitatif dengan ruang lingkup kajian di Aceh pada tahun 2017.

Jenis data yang diperlukan meliputi: a) Data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner dan observasi lapangan; b) Data sekunder terdiri dari Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Gampong Aceh dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; serta, c) Data jumlah desa dan jumlah dana desa yang disalurkan 2015-2017. Sumber data responden meliputi perangkat desa dan masyarakat, yaitu: geuchik (kepala desa), sekretaris desa, tuehapeut (Badan Permusyawaratan Desa), bendahara desa, dan masyarakat desa.

Berdasarkan variabel dan kebutuhan penelitian maka disusun instrumen yang digunakan untuk mengukur nilai variabel dengan metode Guttman dan essay terbuka, seperti penilaian responden terhadap efektivitas aparatur desa dalam pernyataan dibawah ini.

Pertama, variabel efektivitas aparatur desa yang pernyataannya terkait tentang tata kelola program dana desa dan manfaatnya; Kedua, variabel tata kelola yang pernyataannya terkait tentang kesiapan desa dalam melaksanakan kewenangannya sesuai aturan; Ketiga, manfaat dana desa yang pernyataannya terkait tentang manfaat program/kegiatan yang bersumber dari dana desa; Keempat, SILPA yang pernyataannya terkait tentang sisa dana desa sebelumnya.

Berbagai pernyataan yang mengandung indikator diatas diukur dengan menggunakan skala Guttman. Untuk pemberian skor tertinggi 1 dan yang paling rendah 0. Misalnya untuk menjawab ya 1 dan tidak 0. Selain itu didukung dengan essay terbuka untuk mendukung penelitian ini. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah area sampling dan stratified random sampling. Adapun data yang dianalisis menggunakan regresi berganda dengan cross section (data tahunan 2017) dengan model analisis sebagai berikut:

$$EP \text{ Wil. Barat} = \alpha_0 + \alpha_1 TK + \alpha_2 MDD + \alpha_3 SILPA + e \quad (1)$$

$$EP \text{ Wil. Timur} = \beta_0 + \beta_1 TK + \beta_2 MDD + \beta_3 SILPA + \mu \quad (2)$$

$$EP \text{ Wil. Tengah} = \lambda_0 + \lambda_1 TK + \lambda_2 MDD + \lambda_3 SILPA + \phi \quad (3)$$

Dimana :

EP : Efektivitas Aparatur Desa

TK : Tata Kelola

MDD : Manfaat dana desa

SILPA : SILPA

β_0 : Konstanta

β_1 β_3 : Koefisien Regresi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengacu pada permasalahan diatas yaitu menganalisis variabel tata kelola, manfaat dana desa, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan terhadap efektivitas aparatur desa. Maka Tabel 1 di bawah ini memperlihatkan hasil estimasi model analisis data, dengan menggunakan eviews versi 8.

Tabel 1. Hasil Estimasi Model Analisis di Wilayah Barat, Timur dan Tengah

Dependent: EP	Barat	Timur	Tengah
	Koefesien	Koefesien	Koefesien
Intercept	1,320 (0,260)	19,640 (0,068)	16,503 (0,031)
TK	0,162 (0,481)	-0,114 (0,633)	0,120 (0,099)**
MDD	0,695 (0,015)**	0,582 (0,132)	-0,106 (0,383)
SILPA	-0,306 (0,154)	0,260 (0,171)	0,172 (0,217)
R ²	0,596	0,199	0,389

Sumber: Hasil olahan data, Eviews 8 (diolah)

(*) masing-masing signifikan pada critical value 5% (*) dan 10% (**)

Model estimasi analisis di wilayah barat, timur dan tengah mempunyai koefisien determinasi R² = 0,596; R² = 0,199; R² = 0,389, artinya secara keseluruhan variabel bebas dalam model efektivitas hanya dapat menjelaskan 59,6%; 19,9% dan 38,9% variasi yang terjadi, selebihnya adalah akibat faktor gangguan yang tidak diperhitungkan dalam model.

Hasil estimasi pada tabel 1 menunjukkan bahwa regresi pertama di wilayah barat Aceh (Nagan Raya–Singkil) menunjukkan variabel TK memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap efektivitas aparatur desa. Hasil ini mengindikasikan bahwa tata kelola yang dilaksanakan masih ada kendala, seperti kesulitan membuat laporan realisasi penggunaan dana desa (baik tahap I maupun laporan tahunan), dan kesulitan laporan realisasi via online (aplikasi berbasis *we* OMSPAN). Hal ini disebabkan oleh keterlambatan penyerahan dokumen sebelumnya (tahun lalu atau semester lalu) sehingga berdampak pada keterlambatan pencairan dana tahap I dan II serta peran SDM nya perlu diperhatikan juga.

Penelitian ini juga sejalan dengan Latifah dan Azis (2016) yang menyatakan bahwa proses penyaluran dana desa saat ini masih mengalami kendala. Hal ini masih dianggap wajar karena dana desa ini merupakan program baru dan masih terus dalam proses perbaikan mengingat kondisi di lapangan. Adapun yang menjadi kendala lemahnya kapasitas dan kapabilitas SDM pemerintahan daerah, khususnya pemerintahan desa hingga menyebabkan keterlambatan dalam proses penyaluran dana desa. Ini disebabkan sebagian daerah belum memasukkan dana desa dalam APBD induk; sebagian daerah terlambat menetapkan perbup/perwali tentang pengalokasian dana desa per desa; sebagian daerah harus merubah penetapan alokasi dana desa per desa karena jumlah desanya berbeda dengan yang ditetapkan dalam Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri); sebagian daerah terlambat menetapkan perbup/perwali tentang pedoman pengelolaan keuangan desa

dan tentang pengadaan barang/jasa di desa; sebagian daerah menambahkan persyaratan penyaluran dana desa dari RKUD ke rekening kas desa berupa dokumen RPJMDesa dan RKPDesa, yang semakin menyulitkan bagi desa untuk segera menerima dana desa; sebagian daerah memeriksa dokumen pertanggungjawaban dana desa sebagai syarat penyaluran tahapan; terdapat daerah belum berani menyalurkan dana desa ke desa dan sebagian desa belum berani menggunakan dana desa karena belum ada pendamping desa; sebagian desa belum menetapkan APBDesa; dan kekhawatiran perangkat desa terjerat kasus hukum.

Variabel MDD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas aparatur desa. Hal ini mengindikasikan bahwa manfaat dana desa yang dirasakan oleh wilayah barat berdampak pada peningkatan efektivitas aparatur dalam mengelola dana desa. Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sofianto (2017) yang menyatakan bahwa masyarakat desa bangsal merasakan manfaat dana desa melalui lancarnya irigasi untuk persawahan dan transportasi hasil pertanian. Dengan lancarnya saluran irigasi dan transportasi maka kegiatan perekonomian warga menjadi lancar yang diharapkan akan dapat meningkatkan kesejahteraan warga. Artinya manfaat dana desa dirasakan dengan integrasi suatu program seperti infrastruktur, fasilitasi kelompok masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Sebaliknya, variabel SILPA memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap efektivitas aparatur desa. Hal ini mengindikasikan bahwa Silpa masih menghadapi beberapa masalah seperti keterlambatan pencairan dana tahap II sebagai program tidak dapat selesai pada akhir tahun (batas anggaran 25 Desember) dan kesalahan program (di luar prioritas).

Dalam hal terdapat SILPA dana desa secara tidak wajar, bupati/walikota memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan Dana Desa sebesar SILPA.

SILPA Dana Desa secara tidak wajar terjadi karena penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa, pedoman umum, atau pedoman teknis kegiatan, dan penyimpanan uang dalam bentuk deposit lebih dari dua bulan (Novita, 2016), Artinya masih ada program yang dilaksanakan tidak sesuai dengan potensi desanya dalam skala prioritas.

Hasil estimasi pada tabel 1 menunjukkan bahwa regresi kedua di wilayah timur Aceh (Aceh Utara-Aceh Tamiang) menunjukkan variabel TK memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap efektivitas aparatur desa. Hasil ini mengindikasikan bahwa tata kelola yang dilaksanakan masih ada kendala dan hasil ini sejalan dengan lokasi di Wilayah Barat Aceh.

Variabel MDD memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap efektivitas aparatur desa. Hasil ini mengindikasikan bahwa manfaat dana desa yang dilaksanakan masih belum optimal dikarenakan perangkat desa masih khawatir dalam penggunaan dana desa, sehingga berdampak pada program yang diusulkan masih untuk pembangunan infrastruktur dibandingkan program pengembangan ekonomi lainnya. Akibatnya kesejahteraan masyarakat dari manfaat dana desa belum dirasakan sepenuhnya. Sebaliknya, variabel SILPA memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap efektivitas aparatur desa. Hal ini mengindikasikan bahwa Silpa masih menghadapi beberapa masalah yang sejalan dengan lokasi di Wilayah Barat Aceh.

Hasil estimasi pada tabel 1 menunjukkan bahwa regresi ketiga di Wilayah Tengah Aceh (Aceh Tengah) menunjukkan variabel TK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas aparatur desa. Hasil ini mengindikasikan bahwa tata kelola yang terencana/terukur berdampak pada pelaksanaan aparatur dalam mengelola dana desa. Hal ini sejalan dengan Jurniadi et.all (2015) dan yang menyatakan bahwa untuk mengelola alokasi dana desa, desa harus mempersiapkan kelembagaan yang terdiri dari tim pelaksana, tim pengawas dan tim evaluasi secara khusus. Tim-tim tersebut dibutuhkan agar alokasi dana desa dapat terkelola dengan baik dan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Karena, berbeda dengan masa lalu dimana bantuan untuk desa dari pemerintah daerah kabupaten/kota secara kelembagaan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah kabupaten/kota tersebut, maka dengan alokasi dana desa pelaksana program adalah perangkat desa bersama masyarakat desa.

Variabel MDD memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap efektivitas aparatur desa. Hasil ini mengindikasikan bahwa

manfaat dana desa yang dilaksanakan masih belum optimal dan sejalan dengan lokasi di Wilayah Timur Aceh. Sebaliknya, variabel SILPA memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap efektivitas aparatur desa. Hal ini mengindikasikan bahwa Silpa masih menghadapi beberapa masalah yang sejalan dengan lokasi di Wilayah Barat Aceh dan Wilayah Timur Aceh

KESIMPULAN

Hasil estimasi regresi pertama di wilayah barat Aceh (Nagan Raya–Singkil) menunjukkan variabel TK memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap efektivitas aparatur desa; variabel MDD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas aparatur desa; dan variabel SILPA memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap efektivitas aparatur desa.

Hasil estimasi regresi kedua di wilayah timur Aceh (Aceh Utara-Aceh Tamiang) menunjukkan variabel TK memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap efektivitas aparatur desa; variabel MDD memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap efektivitas aparatur desa; dan variabel SILPA memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap efektivitas aparatur desa.

Hasil estimasi regresi ketiga di wilayah tengah Aceh (Aceh Tengah) menunjukkan variabel TK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas aparatur desa; variabel MDD memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap efektivitas aparatur desa; dan variabel SILPA memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap efektivitas aparatur desa.

REKOMENDASI

Selanjutnya, untuk pengembangan potensi desa sebagai salah satu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka penulis merekomendasikan beberapa hal kedepan yang dilakukan pemerintah desa agar mengejar ketertinggalan dengan desa lainnya, seperti:

1. Adanya peran aktif perangkat desa untuk berkonsultasi kepada bagian keuangan, DPMG, dan instansi terkait, sehingga proses penyiapan dokumen dapat dilakukan secara cepat dan tepat.
2. Perlunya pelatihan bagi aparatur-aparatur desa dalam penyusunan dokumen perencanaan untuk tercapainya sinkronisasi program dengan prioritas bagi desa.
3. Perlu adanya sosialisasi oleh pemerintah daerah secara terpadu untuk menyamakan pandangan tentang penerjemahan regulasi Dana Desa sehingga akan memudahkan

perangkat desa tidak ragu dalam menggunakan dana desa.

4. Penelitian selanjutnya diharapkan para peneliti menambahkan kembali lokasi penelitian di kabupaten/kota agar mendapatkan hasil yang lebih baik lagi atau pun membandingkan dengan provinsi lainnya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Chenny Seftarita, dan Bapak Fakhrudin, SE, MSE atas segala saran yang telah diberikan selama penulisan artikel ini. Penulis berterimakasih juga kepada pihak Litbang Bappeda Aceh yang telah memberikan kesempatan bagi penulis mengambil data yang diperlukan. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada keluarga dan teman-teman semua atas segala doa, bantuan, dan motivasi yang diberikan selama ini

DAFTAR PUSTAKA

Daldjoeni, N dan A. Suyitno. 2004. Pedesaan, Lingkungan dan Pembangunan. Bandung: PT. Alumni.

Jurniadi, Djumadi, dan Paranoan. 2015. Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur, Jurnal Administrative Reform, 2015, 1 (1): 112-124

Julianto, A. 2017. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan (Studi Komparatif antara Desa Mambulu dan Desa Pagaluyon), Jurnal Pemerintahan Integratif, Vol. 4 (5), 478-487.

Latifah N, dan Azis L. 2016. Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa, Jurnal Penelitian Politik Vol.13, No. 2

Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta, Andi

Munti F dan Heru F. 2017. Determinan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa: Studi pada Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen Aceh, Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol. 18 No. 2

Saputra, W I. 2016. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014. Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE), Volume: 6 Nomor: 1.

Siagian, S P. 1978. Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya. Jakarta: Penerbit Gita Karya

Siregar, AF dan Fazli Syam BZ. 2017. Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa di Kabupaten Deli Serdang), Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), Vol. 2, No. 4.

Sofianto A. 2017. Kontribusi Dana Desa terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kebumen dan Pekalongan, Matra Pembaruan 1 (1) : 23-32

Novita, D. 2016. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Tahun 2015 di Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, Skripsi, Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan.

Zaini, FHA. 2014. Pembangunan pedesaan [online]. Dari https://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_pedesaan. [Diakses tanggal 14 Mei 2014]